

Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022)

Deannes Isyuardhana¹, Ida Bujangga Ayu Diah Parmita²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, Deannes@telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, gekayuparmita@student.telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Objek penelitiannya adalah industri subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019–2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor independen seperti jumlah dewan komisaris independen, komite audit, komite manajemen risiko, dan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Dalam penelitian ini, dua belas sampel digunakan, sehingga total 48 sampel digunakan. Purposive sampling digunakan sesuai dengan standar tertentu, dan Eviews-12 digunakan sebagai alat untuk melakukan regresi data panel dan analisis statistik deskriptif. Hasil menunjukkan komite manajemen risiko, komite audit, komite manajemen risiko, dan komite pengawasan independen secara bersamaan mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Namun, secara parsial, hanya komite manajemen risiko yang berpengaruh positif pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2019–2022.

Kata kunci-*audit committee, risk management committee, proportion of board commissioners independent, risk management disclosure*

I. PENDAHULUAN

Dunia bisnis yang dinamis dan tidak menentu saat ini, manajemen risiko menjadi semakin penting. Selaras dengan Peraturan No. 29/PJOK.04/2016, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) di Indonesia wajib menyampaikan laporan tahunan mencakup tanggung jawab sosial, pengungkapan risiko, dan lingkungan hidup. Sejak akhir 2019, pandemi COVID-19 melanda ekonomi dunia, termasuk sektor telekomunikasi di Indonesia. Meskipun sektor ini berkembang dengan baik, perusahaan harus lebih fokus pada pengungkapan manajemen risiko karena ketidakpastian kebijakan pemerintah selama pandemi. Menurut Survei Nasional Manajemen Risiko yang dilakukan pada tahun 2022, perubahan peraturan pemerintah dan risiko keuangan adalah masalah utama bagi dunia usaha di Indonesia.

Perusahaan memerlukan tim kepatuhan yang kuat dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar agar tetap relevan dan kompetitif. Menurut CRMS (2019), banyak tantangan yang masih dihadapi oleh perusahaan di Indonesia untuk menerapkan manajemen risiko. Beberapa di antaranya adalah tidak adanya roadmap untuk memasukkan manajemen risiko ke dalam strategi perusahaan, kekurangan sumber daya seperti teknologi, SDM, dan anggaran, dan kurangnya informasi dan pelatihan yang memadai. Tidak ada cara untuk menghindari risiko sepenuhnya. Namun, pengungkapan manajemen risiko yang baik dapat membantu mengantisipasi dan meminimalkan efeknya (Dwiharto, 2020). Dalam industri Telekomunikasi, kasus seperti kampanye agresif yang dilakukan Indosat Ooredoo dengan tagar #buktikanRp1 menunjukkan betapa pentingnya manajemen risiko dalam menghadapi persaingan pasar. Kampanye ini menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi masalah dalam mengelola risiko reputasi, kepatuhan terhadap regulasi, dan risiko operasional dan strategis di tengah dinamika pasar yang berubah dengan cepat (Kominfo, 2016).

Manajemen risiko dapat diterapkan pada bisnis untuk mengantisipasi dan meminimalkan kerugian, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kesejahteraan konsumen dan stakeholder. Kemitraan dengan penyedia teknologi dan keamanan data sangat penting di era digital. Selain risiko hukum dan kemungkinan kegagalan perencanaan tenaga kerja, pengembangan keterampilan karyawan dan kepatuhan terhadap peraturan sangat penting. Kompleksitas faktor

risiko yang dihadapi industri bisnis menjadi lebih jelas setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan adalah cara terbaik untuk mengelola berbagai risiko yang dihadapi perusahaan. Hasil penelitian tentang pengungkapan manajemen risiko oleh Lokaputra et al. (2022) dan (Rahmawati & Prasetyo, 2020) tidak signifikan. Qulyubi et al. (2023) & Dwiharto, (2020), ukuran perusahaan tidak berdampak pada pengungkapan risiko. Ada paparan latar belakang yang mencakup kejadian dan fenomena sehingga penelitian dengan topik pengungkapan manajemen risiko dengan fokus penelitian pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019 – 2022 masih layak untuk dikaji ulang.

II. TINJAUAN LITERATUR

A. *Agency Theory*

Jensen dan Meckling pertama kali mengusulkan teori agensi pada tahun 1976. Mereka menyatakan bahwa hubungan agensi terjadi ketika seorang pemimpin mempekerjakan orang lain untuk memberikan layanan dan memberi mereka kemampuan untuk membuat keputusan (Purba, 2023:23). Prinsipal merupakan pemilik saham (investor), sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Hal tersebut menunjukkan perbedaan di antara kontrol manajemen dan kepemilikan investor. Purba (203:24) mengatakan bahwa ketua memberi perintah kepada agen untuk melakukan berbagai tugas atas namanya. Hasilnya adalah bahwa teori pemangku kepentingan memperluas perspektif keagenan dan merumuskan posisi manajer dan perusahaan. Menurut penelitian (Suryani et al., 2023), Konflik sering dihasilkan oleh hubungan antara manajemen dan pemilik yang dinyatakan oleh teori agensi karena kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Sebagai pemilik bisnis, prinsipal menginginkan kinerja tinggi untuk memaksimalkan keuntungan, jadi manajemen sering memanipulasi laporan keuangan untuk membuat perusahaan terlihat menguntungkan di mata prinsipal. Dari perspektif yang bertanggung jawab, manajer harus berusaha mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi kepentingan semua pihak yang terlibat, membuat dana pensiun untuk berbagai mitra dengan cara yang mengimbangi semua kepentingan, dan mengembangkan bisnis mereka (Ghazieh & Chebana, 2021). Akibatnya, diperlukan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa tindakan agen sesuai dengan kepentingan pemilik.

B. Pengungkapan Manajemen Risiko

Pengungkapan manajemen risiko dianggap penting bagi setiap perusahaan. Informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami harus disertakan dalam pengungkapan ini. Salah satu tujuan pengungkapan manajemen risiko perusahaan adalah untuk mengembalikan kepercayaan investor, memastikan bahwa semua aktivitas manajemen diawasi dan tidak ada bukti kecurangan. Studi yang dilakukan oleh Oktavia & Krido (2023) menggunakan pendekatan *indeks framework International Standard Organization (ISO) 31000:2018*. Berdasarkan pendekatan ini, pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan perusahaan harus diberi skor 1, sementara pengungkapan yang tidak tercantum pada *annual report* harus diberi skor 0. Selanjutnya, item dikumpulkan untuk mendapatkan nilai indeks pedoman. Pengungkapan manajemen risiko digunakan sebagai strategi untuk memberi tahu pembaca laporan tahunan tentang bahaya yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Informasi tentang risiko perusahaan membantu para *stakeholder*, dalam membuat keputusan investasi. Rumus pengungkapan manajemen risiko

$$RMD = \frac{\sum \text{Jumlah Item Pengungkapan Risiko yang dilakukan Perusahaan}}{\sum 31 \text{ Item Pengungkapan Risiko}} \quad (2.1)$$

C. *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip tata kelola dipandang sebagai pedoman manajemen bisnis yang dimaksudkan untuk membangun sistem manajemen yang sukses yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Menurut Cahyaningsih dan Martina (2011), struktur manajemen perusahaan menjelaskan bagaimana hak dan tanggung jawab dibagi antara semua pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Dengan melakukan hal-hal ini, pemantauan kinerja dan visi misi perusahaan diharapkan dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan dengan baik.

D. Dewan Komisaris Independen

Dijelaskan bahwa setiap anggota dewan komisaris memiliki posisi yang setara dengan komisaris utama, menurut buku Rusdiyanto et al. (2019:81), dan tugas serta tanggung jawab mereka adalah mengawasi, memberikan saran kepada direksi, serta memastikan implementasi tata kelola perusahaan, meskipun keterlibatan dalam pengambilan keputusan operasional tidak diizinkan. Proporsi komisaris independen dihitung dengan membagi persentase komisaris

independen dengan total komisaris dalam struktur perusahaan, menurut studi yang dilakukan Lokaputra et al. (2022), *committee commissioners* berfungsi sebagai supervisor independen yang tidak terikat dengan manajemen perusahaan, sehingga mereka dapat memberikan pemeriksaan yang objektif danimbang atas operasi dan aturan perusahaan. Jumlah proporsi yang ada di perusahaan dapat dihitung dengan membagi jumlah komisi yang ada di perusahaan dengan total komisi yang ada di perusahaan, seperti dijelaskan oleh Annisa & Chyntia (2023), yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dan pencegahan penipuan dapat dicapai melalui peran komisaris independen, serta menangani konflik internal, mengawasi kebijakan manajemen, dan memberikan nasihat kepada manajemen. Menurut teori keagenan, pengungkapan manajemen risiko bisa dipengaruhi oleh dewan komisaris independen, karena teori ini menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat muncul, ketika manajemen memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan dibandingkan dengan pemilik modal, yang menyebabkan asimetri informasi (Yulianto et al., 2021).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\Sigma \text{Komisaris Independen}}{\Sigma \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \quad (2.2)$$

E. Ukuran Komite Audit

Komite audit, bertanggung jawab mengawasi sistem internal perusahaan. Komite ini dianggap sebagai bagian integral dari sistem pengendalian perusahaan, berperan sebagai penghubung dewan komisaris dan pemegang saham dengan manajemen, dalam upaya menyelesaikan masalah pengendalian (Rusdiyanto et al., 2019). Dinyatakan bahwa jumlah anggota *audit committee* dalam sebuah organisasi memengaruhi tingkat peningkatan fungsi pengawasan risiko. Oleh karena itu, jumlah anggota *audit committee* dalam suatu organisasi dapat memengaruhi tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan (Lokaputra et al., 2022):

$$KA = \Sigma \text{Jumlah Komite} \quad (2.3)$$

F. Komite Manajemen Risiko

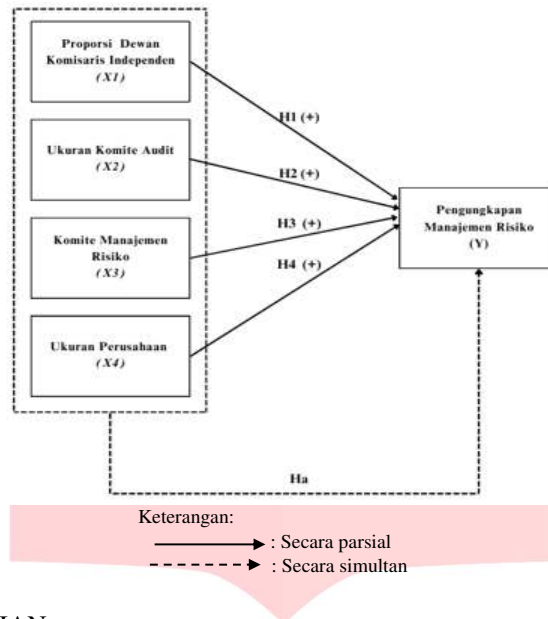
Dalam struktur organisasi perusahaan, tugas untuk mengidentifikasi risiko dan merancang risiko dengan metode yang sesuai dengan ukuran dan ketidakpastian bisnis dilakukan oleh *risk management committee*. Penelitian oleh Oktavia dan Krido (2023) mengukur keberadaan *RMC* menggunakan *dummy variable*, di mana perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko diberi skor 1, sedangkan yang tidak memiliki diberi skor 0 (Lokaputra et al., 2022). Tanggung jawab ini meliputi perancangan, penerapan alat manajemen risiko yang diperlukan, serta pengawasan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi.

G. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dianggap mencerminkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Menurut Dhiharto (2020), ukuran perusahaan meliputi seberapa besar atau kecil perusahaan tersebut, yang dapat diukur melalui berbagai cara seperti, tenaga kerja, tingkat produksi, dan kapasitas modal. Semua faktor ini tercermin dalam total aset perusahaan. Perusahaan besar cenderung terlibat dalam aktivitas yang lebih kompleks, sehingga menghadapi risiko yang lebih tinggi. *firm size* dihitung berdasarkan total aset perusahaan, sesuai dengan pendekatan yang digunakan Agustina et al. (2021). Perusahaan besar terlibat dalam aktivitas yang lebih kompleks meningkatkan risiko. Oleh karena itu, ukuran perusahaan digunakan sebagai salah satu komponen dalam pengungkapan manajemen risiko perusahaan. Total aset perusahaan digunakan untuk mengukur variabel ukuran perusahaan, sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang mengacu pada Abbas et al

$$\text{Firm Size} = \text{Ln (Total Aset)} \quad (2.4)$$

H. Kerangka Pemikiran



III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode kuantitatif diterapkan dalam penelitian ini, termasuk analisis numerik dan statistik, Sugiyono (2022). Fokus penelitian adalah hubungan antara variabel yang diukur dengan instrumen tertentu, Sugiyono (2022). Dengan menggunakan data sekunder dari annual report, unit analisis mencakup 48 perusahaan telekomunikasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019-2022. 12 populasi yang memenuhi kriteria dipilih dengan masa pengamatan 4 tahun. Data dikumpulkan dengan teknik sampling non-probability. Untuk melakukan analisis data, hipotesis diuji berdasarkan hubungan yang diduga antara variabel.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil uji model data panel yang terpilih adalah *random effect model*, dengan persamaan sebagai berikut

$$Y = 0.498294 + 0.089521 + 0.037202 + 0.074287 + 0.0030049 + e$$

B. Hasil Uji F

Tabel IV.8 Uji Signifikansi Simultan (F)

R-squared	0.351679	Mean dependentvar	0.123672
Adjusted R-squared	0.291370	S.D. dependentvar	0.024275
S.E. of regression	0.020435	Sum squared resid	0.017956
F-statistic	5.831297	Durbin-Watson stat	1.141378
Prob(F-statistic)	0.000769		

Sumber: Output Eviews 12, (2024)

Dengan hasil *Prob. F-statistic* 0.000769 < 0,05. Disimpulkan Ho ditolak, sehingga variabel independen PDKI, UKA, KMR, dan UP diketahui memengaruhi variabel dependen secara simultan. Variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 29,13% sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Adjusted R-squared*.

C. Hasil Uji t

Tabel IV.9 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.498294	0.095992	5.190967	0.0000
PDKI	0.089521	0.046827	1.911752	0.0626
UKA	0.037202	0.022206	1.675319	0.1011
KMR	0.074287	0.018678	3.977197	0.0003
UP	0.003019	0.002693	1.132282	0.2638

Sumber: *Output Eviews 12*, (2024)

1. Bersamaan dengan hasil Lokaputra et al. (2022), di mana PDKI (X1) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PMR (Y), meskipun hal ini berbeda dengan penelitian Oktavia & Krido (2023) dan Widhiawati & Halmawati (2018).
2. Dilihat dari nilai Prob. 0.0626, menurut penelitian ini serta hasil penelitian Annisa & Pratiwi (2023) dan (Widhiawati & Halmawati, 2018), komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko tidak berpengaruh secara parsial, meskipun berbeda dengan penemuan Lokaputra et al. (2022) yang menunjukkan pengaruh yang signifikan..
3. Keberadaan komite manajemen risiko berpengaruh positif pada pengungkapan risiko, Menurut hasil (Lokaputra et al., 2022) dan Qulyubi et al. (2023), adanya *risk management committee* yang meningkatkan *risiko disclosure*. Ini mendukung rekomendasi untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalam organisasi manajemen.
4. Temuan penelitian ini, bersama dengan temuan Qulyubi et al. (2023) dan Dwiharto (2020), menunjukkan ukuran perusahaan tidak berdampak pada pengungkapan manajemen risiko. Sebaliknya, Abbas et al. (2021) mencatat adanya pengaruh positif terhadap *risk disclosure*.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan manajemen risiko dipengaruhi secara bersama-sama oleh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, komite manajemen risiko, dan ukuran perusahaan. Secara parsial, dampak positif terhadap pengungkapan manajemen risiko diberikan oleh komite manajemen risiko.

B. Saran

Untuk meningkatkan hasil temuan tentang pengungkapan manajemen risiko, penelitian selanjutnya harus menggunakan sampel yang lebih besar dan mencakup perusahaan di luar Bursa Efek Indonesia. Peneliti juga menyarankan untuk menambahkan variabel seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor. Ini karena variabel independen dalam penelitian ini hanya menjelaskan 29,13% dari variasi pengungkapan manajemen risiko dan 70,87% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

REFERENSI

Buku:

- Badawi, A., Supardi, Jacob, J., Sumeidi, K., Siahaan, A., Nuraini, A., Vikaliana, R., & Faddila., S. P. (2022). *Riset Terapan Dengan Aplikasi Statistika* (A. Iskandar (Ed.); Cetakan Pe, Vol. 01). Widina Media Utama.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis : Teknik dan Analisa Data dengan SPSS - STATA - EVIEWS*. Madenatera, 1,230.https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=T1nJQ0cAAAAJ&citation_for_view=T1nJQ0cAAAAJ:D03iK_w7-QYC
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*. In *Merdeka Kreasi Group* (cetakan pe, Issue maret). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Rusdiyanto, Susetyorini, & Elan, U. (2019). *Good Corporate Governance Teori dan Implementasinya* (N. F. Atif (ed.); cetakan ke). PT Refika Aditama.
- Rustam, B. R. (2022). *Manajemen Risiko: Prinsip, Penerapan dan Penelitian* (S. Yuli (ed.); EDISI 2). Salemba Empat.
- Sardi, E. sutisno. (2023). *Manajemen risiko Substansi dan Fundamental* (Monalisa (ed.); cetakan ke). PT. Raja

Grafindo Persada.

Sidik, P., & Denok, S. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Cetakan Pertama). Pascal Books.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.

Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2018a). *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000:2018* (D. Novita (ed.)). PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Jurnal Internasional:

Abbas, D. S., Ismail, T., Taqi, M., & Yazid, H. (2021). *Determinants of enterprise risk management disclosures: Evidence from insurance industry. Accounting*, 7(6), 1331–1338. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.4.005>

Agustina, L., Jati, K. W., Baroroh, N., Widiarto, A., & Manurung, P. N. (2021). *Can the risk management committee improve risk management disclosure practices in Indonesian companies? Investment Management and Financial Innovations*, 18(3), 204–213. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(3\).2021.19](https://doi.org/10.21511/imfi.18(3).2021.19)

Annisa, N., & Chyntia, E. (2023). *The Integrity Of Financial Statements: Firm Size, Independent Commissioners, And Auditor Industry Specializations. Jurnal Akuntansi*, 27(1), 1–18. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i1.1086>

Dwiharto, P. (2020). *Factors Affecting The Area Of Risk Management Disclosures. International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(1), 1–9. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/1380>

Ghazieh, L., & Chebana, N. (2021). *The effectiveness of risk management system and firm performance in the European context. Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 26(52), 182–196. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2019-0118>

Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., Segaf, & ... (2023). *Effect of Company Size Ownership Concentration Auditor Reputation Board of Commissioners and Risk Management Committee on Disclosure of Enterprise Risk Management. Management*, 13(3). <https://www.enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/1495>

Rahmawati, D. L., & Prasetyo, K. (2020). *Determinants on the extent of enterprise risk management (ERM) disclosure in annual reporting: An Indonesian study. International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(4), 512–525. https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_4/13448_Rahmawati_2020_E_R.pdf

Suryani, E., Winarningsih, S., Avianti, I., Sofia, P., & Dewi, N. (2023). *Does Audit Firm Size and Audit Tenure Influence Fraudulent Financial Statements? Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 17(2), 26–37. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i2.0>

Yulianto, A., Yanti, A. N. F., Solikhah, B., & Ali, S. (2021). *Risk Management Disclosures: An Investigation Using Risk Management Committee as a Moderating Variable. Jurnal Dinamika Akuntansi*, 13(1), 93–105.

Jurnal Nasional:

Annisa, N., & Pratiwi, Y. (2023). *Pengaruh Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, Dan Risk Management Committee Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 234–243. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i1.1163>

Cahyaningsih, C., & Martina, V. Y. (2011). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial. Jurnal Siasat Bisnis*, 15(2), 171–186. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss2.art2>

Lokaputra, M., Anugerah, R., & Kurnia, P. (2022). *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. 17(1)*, 50–63. <https://jkaa.bunghatta.ac.id/index.php/JKAA/article/view/67>

Malik, A. & Kristanti, F. . (2023). *Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Risk Management Committee, Reputasi Auditor Dan Kompetensi Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko. Edunomika – Vol. 07, No., 01(02)*, 1–23. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/9112>

Muslih, M. dan, & Maghfiroh. (2023). *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko Perusahaan JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi). JIMEA (Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 1–17. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1624>

Oktavia, F. U., & Krido, E. C. (2023). *pengaruh ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan struktur kepemilikan institusi terhadap pengungkapan manajemen risiko pada Perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Profitabilitas, Exposure Media Dan Umur Perusahaan ...*

Oktaviana, I. R., & Puspitasari, E. (2022). *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pengungkapan enterprise risk management pada perusahaan manufaktur. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 826–

836. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.1933>

Widiawati, W., & Halmawati, H. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Enterprise Risk Management (ERM) Disclosure (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017). *Wahana Riset Akuntansi*, 6(2), 1281. <https://doi.org/10.24036/wra.v6i2.102512>

Buletin:

Kominfo. (2016). KPPU Akan Selidiki Dua Kasus Terkait Indosat Versus Telkomsel. Kominfo.Go.Id. https://www.kominfo.go.id/content/detail/7729/kppu-akan-selidiki-dua-kasus-terkait-indosat-versus-telkomsel/0/sorotan_media

Kominfo. (2021). Konstan Menjaga Pertumbuhan Sektor Informasi dan Komunikasi. Kominfo.Go.Id. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/33003/konstan-menjaga-pertumbuhan-sektor-informasi-dan-komunikasi/0/artikel>

Studies, C. for R. M. (2019). Survei Nasional Manajemen Risiko 2019. In CRMS Indonesia.

Studies, C. for R. M. (2022). Survei Nasional Manajemen Risiko 2022. In CRMS Indonesia.. <https://crmsindonesia.org/crms-polling/fokus-risiko-perusahaan-selama-tahun-2022/>

Badan Pusat Statistik. (2019). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2020/12/02/be999725b7aece62d84c6660/statistik-telekomunikasi-indonesia-2019.html>

Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2021/10/11/e03aca1e6ae93396ee660328/statistik-telekomunikasi-indonesia-2020.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2021*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2021.html>

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2022*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/09/07/bcc820e694c537ed3ec131b9/statistik-telekomunikasi-indonesia-2022.html>

Peraturan:

Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6 /POJK.04/2021. (2021) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

OJK. (2016). Pojk 29/Pojk.04/2016/bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan Mengingat informasi oleh Emiten. Ojk.Go.Id, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). POJK No 55 /POJK.04/2015 Tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Ojk.Go.Id, 1–29. <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/Documents/SAL-POJK PERIZINAN FINAL F.pdf>

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, 11 Analytical Biochemistry 1 (2018). https://www.ecgi.global/sites/default/files/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1 (2011). <http://jdih.bumn.go.id/baca/PER-01/MBU/2011.pdf>